

Pemblokiran Entitas PBK Ilegal Nasional Mencapai 1.029 Situs

Tanggal : Senin , 16 November 2020
Media : validnews.id
Halaman : 1
Wartawan : Khairul Kahfi
Muatan Berita : Positif
Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*)
Rubrik : Ekonomi
Topik : Blokir Situs Ilegal

EKONOMI

Pemblokiran Entitas PBK Ilegal Nasional Mencapai 1.029 Situs

Pemblokiran ini bekerja sama dengan Kemenkominfo serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia
16 November 2020 , 20:40



Foto obligasi negara. Shutterstock/Idok

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti telah memblokir sebanyak 1.029 domain entitas tak berizin hingga Oktober 2020.

Dalam perkembangan pemblokiran terbaru, Bappebti memblokir sebanyak 115 domain situs entitas tak berizin usaha sebagai pialang berjangka. Pemblokiran ini bekerja sama dengan Kemenkominfo serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan, kegiatan siber dan pemblokiran atas domain situs entitas ilegal dalam rangka komitmen pemerintah melindungi masyarakat dari praktik perdagangan berjangka komoditi atau PBK tak resmi.

"Serta memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," ujarnya dalam rilis resmi, Jakarta, Senin (16/11).

Ia menegaskan, setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang PBK wajib mendapatkan perizinan Bappebti. Serta tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air. Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti juga dilarang menjalankan kegiatan usaha perdagangan berjangka.

Meskipun demikian, banyak pihak yang menawarkan kontrak berjangka dan mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri.

"Kegiatan tersebut termasuk promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," jelasnya.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M Syist mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pembatasan. Agar beragam situs pialang berjangka tak mengantongi izin Bappebti tidak dapat diakses di dalam negeri. Biasanya pialang berjangka sejenis ini menggunakan introducing broker atau IB sebagai perwakilan di Indonesia.

"Tentu ini melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan berpotensi merugikan masyarakat," katanya.

Saat ini, semakin marak situs web menggunakan nama mirip dengan pialang berjangka berizin dari Bappebti dan perusahaan investasi yang memiliki izin dari OJK.

Situs bodong ini dibuat untuk menarik minat masyarakat dan menawarkan paket-paket investasi dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, situs ini juga menjanjikan keuntungan tetap atau fix income di luar batas kewajaran.

Syist berharap masyarakat tidak mudah tergir dengan beragam promosi yang dilakukan entitas ilegal. Lalu, mentransfer sejumlah uang ke rekening oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Dapat dipastikan setelah melakukan transfer, oknum tersebut tidak dapat dihubungi dan uang yang disetorkan akan dibawa kabur," jelasnya.

Syist juga mengimbau agar masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka dapat mempelajari terlebih dahulu tentang latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, serta kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan.

Masyarakat juga diharapkan dapat mempelajari tentang Wakil Pialang Berjangka yang mendapat izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan resiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergir keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, masyarakat juga dapat melihat profil dan legalitas perusahaan melalui situs: <https://www.bappebti.go.id>," ujarnya. (Khairul Kahfi)